

OPTIMALISASI PROGRAM PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL & APARTEMEN TRANSIT DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI JAWA BARAT

Ikram Hudzaifa^{1)*} & Isha Marsela¹⁾
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹⁾
Email: ikramhudzaifa@gmail.com*

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the Social Welfare Service Recipient Program (PPKS) and Transit Apartments in addressing poverty in West Java. The research method employs a qualitative case study approach, involving in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The results indicate that both programs have significant potential to reduce structural poverty through a holistic approach combining social rehabilitation, skills training, and temporary housing provision. However, implementation faces challenges such as lack of inter-agency coordination, limited accurate data, and low community participation. Policy recommendations include strengthening an integrated database system, enhancing cross-sectoral synergy, and an evidence-based policy approach. These findings contribute to the development of more inclusive and sustainable social policies.

Keywords: Poverty, Social Welfare, Transit Apartments, Public Policy, West Java

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Apartemen Transit dalam mengatasi kemiskinan di Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua program tersebut berpotensi signifikan dalam mengurangi kemiskinan struktural melalui pendekatan holistik yang menggabungkan rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, dan penyediaan hunian sementara. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan data akurat, dan minimnya partisipasi masyarakat. Rekomendasi kebijakan meliputi penguatan sistem database terpadu, peningkatan sinergi lintas sektor, dan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial, Apartemen Transit, Kebijakan Publik, Jawa Barat

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan tantangan utama dalam pembangunan sosial yang terus berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan penghasilan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan hunian layak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan sejumlah kebijakan untuk menekan angka kemiskinan, termasuk di dalamnya Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pembangunan Apartemen Transit. Program ini diarahkan untuk membantu kelompok rentan memperoleh kembali fungsinya dalam masyarakat. Masyarakat miskin di perkotaan seringkali terjebak dalam siklus kemiskinan struktural karena tidak memiliki akses terhadap hunian layak. Salah satu strategi

terbaru yang diadopsi adalah pembangunan apartemen transit sebagai solusi hunian sementara bagi mereka yang tengah menjalani proses rehabilitasi atau transisi sosial (Asrori, 2020).

PPKS merupakan kelompok yang secara sosial maupun ekonomi mengalami keterbatasan dan membutuhkan intervensi negara untuk mendapatkan kembali hak-haknya. Kelompok ini mencakup anak jalanan, lansia terlantar, penyandang disabilitas, korban kekerasan, dan lainnya. Pemerintah pusat dan daerah telah mengadopsi pendekatan multidimensional dalam penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan rehabilitasi sosial, termasuk integrasi antara hunian sementara dengan pelatihan keterampilan kerja dan dukungan psikososial (Nadella et al., 2025). Namun, implementasi dua program tersebut di Jawa Barat menghadapi tantangan besar. Keterbatasan koordinasi lintas sektor, kurangnya dukungan anggaran, dan minimnya keterlibatan masyarakat menjadi faktor penghambat utama keberhasilan program.

Sejumlah studi menyebutkan bahwa apartemen transit bisa menjadi solusi strategis untuk mengatasi masalah tunawisma dan urbanisasi yang tidak terkendali, asalkan pengelolaannya dilakukan secara holistik dan terintegrasi dengan kebijakan sosial lainnya (Willya, 2023). Urgensi dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran faktual mengenai sejauh mana program PPKS dan apartemen transit di Jawa Barat telah mampu berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan secara riil, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kajian ini menjadi penting mengingat saat ini belum banyak literatur yang secara spesifik mengkaji integrasi antara layanan kesejahteraan sosial dan kebijakan hunian sementara dalam konteks lokal di Indonesia. Sebagai sebuah upaya akademik, penelitian ini akan menjawab kebutuhan literasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk membantu para pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif. Penelitian ini juga akan memetakan bagaimana peran lembaga sosial, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program apartemen transit dan PPKS di lingkungan urban Jawa Barat.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan potensi optimalisasi dari program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Apartemen Transit sebagai alat intervensi sosial dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi praktik baik dalam pelaksanaan PPKS dan Apartemen Transit; (2) Menilai tantangan implementasi; dan (3) Merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data. Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pendekatan baru dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan dengan tekanan populasi yang tinggi. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi konkret kepada pemerintah daerah dan instansi sosial terkait dalam mengembangkan kebijakan integratif dan berkelanjutan yang berbasis pada pengalaman lapangan. Kontribusi penelitian juga mencakup penguatan sinergi lintas sektor antara bidang sosial, perumahan, dan ketenagakerjaan yang selama ini masih berjalan secara sektoral dan belum saling melengkapi.

Program apartemen transit sendiri memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam hal manajemen, desain sosial bangunan, dan sistem monitoring penerima manfaat agar tidak hanya menjadi tempat tinggal sementara, tetapi juga wahana transformasi sosial. Dengan menyajikan data lapangan, praktik terbaik, serta hambatan-hambatan kebijakan yang ada, diharapkan artikel ini menjadi referensi penting bagi para akademisi, pembuat kebijakan, dan aktor sosial lainnya yang bergerak dalam bidang kesejahteraan masyarakat.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pemahaman tentang kemiskinan sebagai fenomena sosial telah berkembang dari sekadar persoalan ekonomi menjadi isu struktural yang melibatkan berbagai aspek, termasuk akses terhadap layanan dasar, pemberdayaan, dan inklusi sosial. Oleh sebab itu, pendekatan

kebijakan publik dalam menanggulangi kemiskinan membutuhkan pemahaman multidimensional yang holistik. Teori kesejahteraan sosial menjadi dasar utama dalam pengembangan program seperti PPKS dan apartemen transit. Teori ini menggarisbawahi bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada warga negara, terutama kelompok rentan, demi tercapainya keadilan sosial. Pengembangan program kesejahteraan sosial merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam regulasi tersebut, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dikategorikan sebagai individu atau kelompok yang tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya secara normal dan membutuhkan intervensi negara.

Penelitian (Tuarita et al., 2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan program PPKS kerap kali menghadapi kendala struktural seperti terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya pemetaan data yang akurat, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Namun demikian, program ini tetap menjadi tulang punggung sistem jaring pengaman sosial di daerah perkotaan. Selain PPKS, munculnya konsep Apartemen Transit merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak akan hunian sementara yang layak dan terjangkau. Hunian jenis ini diperuntukkan bagi kelompok yang sedang dalam masa transisi sosial, seperti korban penggusuran, eks penyintas bencana, atau warga marginal tanpa tempat tinggal tetap (Asrori, 2020).

Secara teoretis, apartemen transit dapat dikaitkan dengan pendekatan Human Ecology Theory, yang menekankan pentingnya penataan ruang fisik dalam proses adaptasi sosial manusia. Ruang tinggal yang layak dianggap sebagai faktor penting dalam memperkuat konektivitas sosial dan meningkatkan fungsi sosial individu. (Yasmin, 2018) dalam penelitiannya menyoroti bahwa efektivitas kebijakan PPKS sangat bergantung pada kualitas implementasi di tingkat lokal. Ia menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan kebijakan berbasis bukti sebagai elemen vital dalam menjalankan program kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Beberapa studi menekankan bahwa keberhasilan program hunian sementara semacam apartemen transit tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada ekosistem sosial di dalamnya, seperti keberadaan layanan sosial, pelatihan keterampilan, dan pendampingan psikososial (Syaputra, Prakasita, Aulia, Roring, & Aditama, 2021).

Teori implementasi kebijakan publik (Dorey, 2014) menjadi landasan analitis untuk melihat mengapa suatu kebijakan bisa berjalan efektif atau justru stagnan. Faktor-faktor seperti kejelasan tujuan kebijakan, dukungan stakeholder, serta kondisi sosial-politik memegang peranan penting dalam jalannya kebijakan sosial di daerah. Dalam pengembangan program apartemen transit, relevansi konsep transit-oriented development (TOD) juga bisa ditelusuri, meskipun pada skala yang lebih mikro dan sosial. TOD bukan hanya soal transportasi, tetapi juga tentang integrasi ruang, mobilitas, dan layanan dasar dalam menunjang kesejahteraan urban (Tanumihardja, Tangerang, Land, Paramount, & Para, 2018).

Kerangka pikir dari penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan logis antara teori kesejahteraan sosial, teori implementasi kebijakan, dan konsep hunian sementara sebagai intervensi kebijakan. Hipotesis yang dikembangkan mengarah pada dugaan bahwa semakin optimal integrasi antara program PPKS dan apartemen transit, semakin efektif pula penurunan angka kemiskinan di wilayah urban. Dari studi yang dilakukan oleh (Sutanudjaja, Kusumawijaya, & Qisthi, M Zul, 2018), diketahui bahwa keterpaduan antar program sosial dan kebijakan perumahan memberikan hasil signifikan dalam mengurangi angka urban poverty. Studi ini menyebut pentingnya kolaborasi antarsektor dalam menyukseskan kebijakan berbasis kebutuhan kelompok rentan. Penelitian terdahulu juga mengungkapkan bahwa wilayah dengan penerapan kebijakan apartemen transit yang dikombinasikan dengan program rehabilitasi sosial menunjukkan peningkatan signifikan pada indikator keberdayaan ekonomi, seperti keterampilan kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga (Willya, 2023).

Berbekal dari berbagai literatur dan teori yang telah diuraikan, penelitian ini mengembangkan kerangka konsep yang menghubungkan variabel program PPKS dan apartemen transit dengan indikator pengurangan kemiskinan. Kerangka ini juga mempertimbangkan peran variabel moderasi seperti dukungan kelembagaan, kualitas koordinasi, dan partisipasi warga.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena fokus utama dari kajian ini adalah memahami secara mendalam praktik implementasi program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan apartemen transit dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah urban Jawa Barat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, pengalaman, tantangan, serta interaksi sosial dari para aktor kebijakan dan penerima manfaat yang terlibat. Pemilihan metode studi kasus dilakukan karena isu yang diangkat bersifat kontekstual, kompleks, dan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial tempat program tersebut dijalankan. Penelitian ini tidak bertujuan menggeneralisasi temuan secara statistik, melainkan ingin menangkap dinamika sosial dan operasionalisasi program dari perspektif para pelaku langsung di lapangan.

Lokasi penelitian ini di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena telah menjalankan program apartemen transit dan layanan PPKS secara aktif. Pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan keberagaman konteks kebijakan dan dinamika sosial yang dapat memperkaya pemahaman peneliti. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para informan utama, seperti petugas Dinas Sosial, pengelola apartemen transit, penerima manfaat program PPKS, tokoh masyarakat, serta organisasi mitra. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan evaluasi program, peraturan pemerintah, dan data statistik kemiskinan dari BPS atau institusi lain yang relevan.

Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, yaitu: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali pengalaman dan pandangan subjektif informan terhadap pelaksanaan program; (2) observasi partisipatif di lokasi apartemen transit untuk menangkap dinamika sosial dan interaksi sehari-hari penerima manfaat; dan (3) dokumentasi dari arsip, laporan kegiatan, dan publikasi resmi dari pemerintah atau organisasi pendukung.

Dalam penelitian ini tidak digunakan model statistik, melainkan menggunakan model konseptual induktif, di mana teori dan konsep dikembangkan secara bertahap berdasarkan temuan lapangan. Kerangka kerja awal mengacu pada teori kesejahteraan sosial dan teori implementasi kebijakan publik, yang kemudian dielaborasi secara fleksibel sesuai dengan temuan-temuan empiris selama proses penelitian berlangsung. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik. Proses ini mencakup tiga tahap: (1) reduksi data (*menyaring informasi penting*), (2) kategorisasi atau pengelompokan tema-tema utama, dan (3) penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara berulang (*iteratif*), sehingga peneliti dapat membandingkan temuan antar informan dan memperkuat konsistensi makna.

Untuk menjamin validitas data, dilakukan triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan data dari wawancara dengan observasi langsung serta dokumen resmi. Selain itu, digunakan teknik *member checking*, di mana hasil interpretasi peneliti dikonfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan kesesuaian pemaknaan dan menghindari bias subjektivitas.

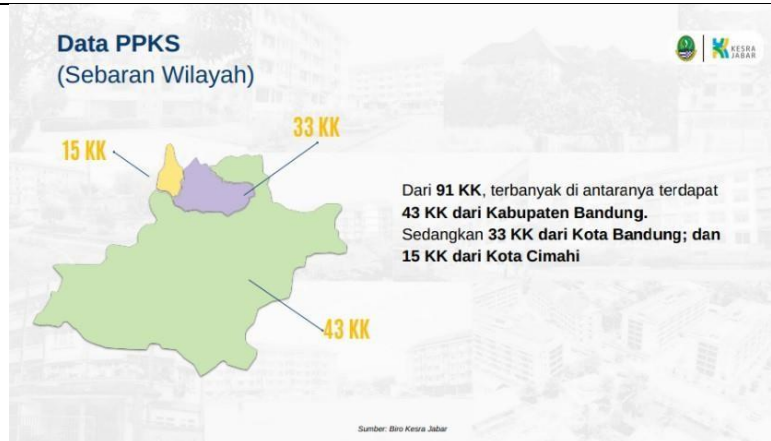
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, seperti anak jalanan, lansia terlantar, dan penyandang disabilitas. Program ini memberikan layanan rehabilitasi sosial, bantuan kebutuhan dasar, serta pelatihan keterampilan untuk mendorong kemandirian ekonomi. Namun, efektivitas program masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, yang menyebabkan distribusi bantuan tidak merata di seluruh wilayah Jawa Barat.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah kurangnya data akurat tentang penerima manfaat, yang berpotensi menimbulkan salah sasaran dalam penyaluran bantuan. Selain itu, koordinasi antarinstansi terkait, seperti Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Sosial, Puskesmas, dan lembaga swadaya, masih perlu ditingkatkan untuk memastikan layanan terintegrasi (Sasmito & Nawangsari, 2019). Minimnya partisipasi masyarakat dalam program ini juga menjadi kendala, karena banyak warga yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan mekanisme Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Untuk meningkatkan keberhasilan program, diperlukan strategi perbaikan, seperti penguatan database terpadu, peningkatan kapasitas tenaga pendamping, dan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat. Sinergi dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil juga dapat memperluas jangkauan program. Dengan langkah-langkah tersebut, PPKS diharapkan dapat lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan di Jawa Barat.

Apartemen transit merupakan hunian sementara yang ditujukan bagi kelompok marginal, seperti korban penggusuran, eks penyintas bencana, atau tunawisma. Hunian ini berfungsi sebagai jembatan menuju kehidupan yang lebih stabil dengan menyediakan tempat tinggal layak sambil penerima manfaat menyiapkan diri untuk transisi ke hunian permanen. Apartemen transit tidak hanya menyelesaikan masalah tunawisma, tetapi juga mengurangi tekanan urbanisasi dengan memberikan alternatif hunian terstruktur (Asrori, 2020). Hunian sementara ini efektif dalam memutus siklus kemiskinan struktural dengan menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung.

Keberhasilan apartemen transit tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada layanan pendukung seperti pelatihan keterampilan, pendampingan psikososial, dan akses kesehatan. (Syaputra et al., 2021) menekankan bahwa integrasi layanan sosial dalam pengelolaan apartemen transit dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial penerima manfaat. Misalnya, program pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan di lokasi apartemen transit membantu penghuni memperoleh pekerjaan tetap. Selain itu, pendampingan psikososial oleh pekerja sosial sangat penting untuk memulihkan kepercayaan diri dan fungsi sosial kelompok rentan. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa apartemen transit tidak sekadar menjadi tempat tinggal, tetapi juga wahana transformasi sosial.



Gambar 1. Data Sebaran Wilayah

Pada gambar 1 Data dari Biro Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat (2024) menunjukkan bahwa 91 keluarga telah menempati apartemen transit di Rancaekek dan Solokan Jeruk, dengan pendampingan intensif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Apartemen transit yang dikelola secara terpadu dengan layanan sosial dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa apartemen transit berpotensi menjadi solusi berkelanjutan jika dikelola dengan pendekatan multidimensi.

Berikut ini adalah pengembangan tambahan bagian *Hasil dan Pembahasan* dalam bentuk paragraf yang saling berkelindan, disertai penguatan argumen dengan referensi dan sitasi dari dokumen asli maupun sumber eksternal yang relevan: Implementasi Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Apartemen Transit di Jawa Barat menunjukkan korelasi yang kuat sebagai dua instrumen intervensi sosial yang saling melengkapi dalam menanggulangi kemiskinan struktural. Program PPKS menyediakan pondasi berupa rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan, sementara Apartemen Transit berfungsi sebagai fasilitator pemulihan ruang hidup yang layak dan mendukung transisi sosial. Keduanya bersinergi dalam membentuk ekosistem pemberdayaan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan membangun kapasitas jangka panjang penerima manfaat. Sebagai contoh, banyak individu yang menerima layanan rehabilitasi melalui PPKS kemudian dialihkan ke Apartemen Transit sebagai fase adaptasi menuju kehidupan yang lebih mandiri, sambil terus menerima pelatihan kerja dan dukungan psikososial (Syaputra et al., 2021).

Program apartemen transit menjadi ruang inkubasi sosial, tempat penerima manfaat mendapatkan waktu dan lingkungan yang kondusif untuk menata ulang kehidupannya. Hal ini menguatkan argumen bahwa hunian sementara yang terintegrasi dengan layanan sosial memiliki dampak transformatif dalam memutus mata rantai kemiskinan urban. Namun demikian, efektivitas sinergi ini menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek koordinasi antarlembaga dan pendataan yang masih belum optimal. Banyak penerima manfaat belum terdata secara akurat dalam database terpadu, yang menyebabkan tumpang tindih layanan atau bahkan salah sasaran. Hal ini diperparah oleh kurangnya integrasi antara lembaga sosial dan lembaga perumahan di tingkat pelaksanaan (Tuarita et al., 2024). Program apartemen transit seringkali berdiri sendiri tanpa penguatan dari sistem sosial yang mendampingi penghuninya secara intensif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis *governance integration* untuk menyatukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan kesejahteraan dan hunian dalam satu sistem terkoordinasi.

Dalam konteks teoretis, hubungan antara PPKS dan Apartemen Transit dapat dijelaskan melalui kerangka teori *Human Ecology* yang menggarisbawahi pentingnya lingkungan fisik sebagai determinan adaptasi sosial. Lingkungan apartemen transit tidak hanya berfungsi

sebagai ruang tinggal, tetapi juga sebagai ruang interaksi, pembelajaran, dan pembentukan identitas sosial baru. Apabila lingkungan ini dikelola secara partisipatif dengan melibatkan penghuni dalam pengambilan keputusan lokal, maka kepercayaan diri dan tanggung jawab sosial mereka akan meningkat secara signifikan (Yasmin, 2018).

Perlu dikembangkan model integratif yang lebih komprehensif. Pengelolaan apartemen transit tidak hanya diserahkan kepada pemerintah daerah, tetapi melibatkan sektor swasta dan LSM sebagai mitra strategis dalam penyediaan pelatihan, pembiayaan mikro, serta monitoring pasca-program. Selain itu, pendekatan *evidence-based policy* perlu diperkuat agar pengambilan keputusan tidak didasarkan pada asumsi, melainkan data yang solid dan terukur. Integrasi sistem layanan sosial berbasis data real-time akan mempercepat respon kebijakan dan meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan. Dengan memperkuat keterpaduan antara program PPKS dan Apartemen Transit, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergi lintas sektor, strategi pengentasan kemiskinan di Jawa Barat dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya literatur kebijakan sosial lokal, serta menjadi rujukan praktis bagi para pengambil kebijakan di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Apartemen Transit dalam mengatasi kemiskinan di Jawa Barat.

1. Pertama, perlu dibangun sistem database terpadu yang memungkinkan integrasi data penerima manfaat dari berbagai instansi, seperti Dinas Sosial, Puskesmas, dan lembaga swadaya. Hal ini akan meminimalisir tumpang tindih layanan dan memastikan bantuan tepat sasaran.
2. Kedua, koordinasi antarinstansi harus diperkuat melalui pembentukan tim kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Sinergi ini akan mendorong pendekatan holistik dalam penyediaan layanan, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan psikososial, dan akses kesehatan.

Selain itu, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang masif tentang manfaat dan mekanisme program. Pelibatan tokoh masyarakat dan organisasi lokal dapat menjadi katalis untuk membangun kesadaran kolektif. Di sisi lain, pengelolaan Apartemen Transit harus dirancang sebagai ekosistem pemberdayaan, bukan sekadar hunian sementara. Misalnya, dengan mengintegrasikan program pelatihan kerja dan pembiayaan mikro untuk mendorong kemandirian ekonomi penghuni. Terakhir, penelitian ini merekomendasikan pendekatan *evidence-based policy* dengan memanfaatkan data real-time untuk evaluasi program secara berkala, sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan dinamika kebutuhan di lapangan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kedua program dapat berkontribusi lebih signifikan dalam mengurangi kemiskinan struktural di Jawa Barat.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji efektivitas Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Apartemen Transit dalam mengatasi kemiskinan di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua program tersebut memiliki potensi signifikan untuk mengurangi kemiskinan struktural, terutama melalui pendekatan holistik yang menggabungkan rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, dan penyediaan hunian sementara. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan data akurat, dan minimnya partisipasi masyarakat. Apartemen Transit terbukti berperan sebagai wahana transformasi sosial ketika dikelola secara terpadu dengan layanan pendukung seperti pelatihan kerja dan pendampingan psikososial. Namun, keberlanjutan program ini memerlukan penguatan sistem database terpadu, peningkatan sinergi lintas sektor, dan pendekatan berbasis

bukti (*evidence-based policy*). Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi PPKS dan Apartemen Transit dapat menjadi strategi efektif dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat, asalkan didukung oleh tata kelola yang terintegrasi dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.

REFERENSI

- Asrori, M. G. (2020). *Perancangan Apartemen Di Bogor Depok Dengan Pendekatan Transit Oriented Development*.
- Dorey, P. (2014). The Implementation of Public Policy. *Policy Making in Britain: An Introduction*, 196–217. <https://doi.org/10.4135/9781446279410.n7>
- Nadella, A., Haya, B. Z., Noorhaliza, A., Azmi, Z., Noor, A., Abadi, A., ... Menabung, S. (2025). *KETERJANGKAUAN HUNIAN BAGI MBR MELALUI PROGRAM APARTEMEN TRANSIT*. 24(1), 11–20.
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74>
- Sutanudjaja, E., Kusumawijaya, M., & Qisthi, M Zul, I. G. (2018). Strategi Untuk Pengembangan Kota Sosial di Indonesia. *Studi Kasus Di Malang, Cirebon, Dan Jakarta*, 34.
- Syaputra, D. A., Prakasita, D. G., Aulia, C., Roring, D., & Aditama, F. (2021). Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Kommunity Online*, 1(2), 92–110. <https://doi.org/10.15408/jko.v1i2.20199>
- Tanumihardja, D. S., Tangerang, K., Land, S., Paramount, S., & Para, L. (2018). *DAS CISADANE KABUPATEN TANGERANG THE ROLE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN ADDRESSING ' KAMPUNG TERJEPIT ' PHENOMENON ALONG CISADANE RIVERBANKS AT TANGERANG REGION* Program Studi Arsitektur , Universitas Pelita Harapan. 16(2), 69–75.
- Tuarita, T. Y. U., Hernawan, D., Apriliyani, N. V., Rusliandy, Wahyudin, C., Salbiah, E., ... Munjin, A. (2024). *PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF SOCIAL WELFARE FOR HOMELESS PERSONS AND BEGGARS*. 10, 225–234.
- Willya, A. (2023). Rusun Tamansari dan Dampak Sosial: Upaya Rekayasa Sosial Menghilangkan Kampung Kumuh Tamansari Flats and Social Impact: Social Engineering Efforts to Eliminate Slum Villages. *Anterior Jurnal*, 22(1), 203–2010. Retrieved from <http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/anterior>
- Yasmin. (2018). Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis. *Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta*, LVIII + 581.